BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN-2013

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 – 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 – 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 – 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

9. TUPOKSI adalah hal –hal yang harus dan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan,visi dan misi suatu organisasi.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (Sumber Daya Manusia),barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombibasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibaha dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujan/Sasaran strategis instansi.
14. TAPKIN adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.
15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
16. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan Strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
17. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

18. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
19. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

a. Menetapkan RPJMD/RENSTRA;
b. Menetapkan RKPD/RENJA;
c. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
d. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
e. Menyusun APBD/RKA/DPA;
f. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
g. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan;
h. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 – 2015 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 1 April 2013

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 APRIL 2013

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 – 2015

VISI:

Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan sejahtera dan bertaqwa melalui percepatan pengembangan kualitas SDM,sistem ekonomi kerakyatan serta peningkatan infrastruktur dan saran dasar.

No	MISI	SASARAN STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat	Mempermudah akses informasi dan peningkatan pelayanan pendidikan agama kepada masyarakat	1. Penyelenggaran Peringatan Hari-hari Besar Islam. 2. Pelaksanaan MTQ Tk.Kabupaten Solok Selatan 3. Pemberian Insentif kepada Guru MDA/TPA 4. Pemberian Insentif kepada Garim

			5. Fasilitasi Jamaah Haji Kabupaten Solok Selatan 6. Lomba Azan dan Shalat Jenazah serta lomba Qasidah Rebana Tk.Kabupaten Solok Selatan
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan,kesehatan,kehidupan dan martabat masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan,khususnya pendidikan dasar dan menengah baik pendidikan umum dan SMK	1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Penuntasan Melek Huruf/Keaksaraan Fungsional 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) 4. Angka Partisipasi Murni (APM) 5. Rasio Siswa-Sekolah 6. Rasio Siswa-Guru 7. Angka Lulusan 8. Tersedianya Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

			9. Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Pengelola dan Pendidik PAUD 10. Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Siswa TK dan PAUD 11. Penyelenggaraan Try-Out Ujian Nasional 12. Penyelenggaraan HIMPAUDI Dan Forum PAUD 13. Penyelenggaraan Pendidikan 14. Terlaksananya Ujian Nasional 15. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan seleksi Olimpiade Sains di Kabupaten Solok Selatan 16. Tersedianya siswa yang berprestasi dan mampu mewakili Kab.Solok Selatan ke tingkat Propinsi dan Nasional

			17.Tersedianya Siswa Atlit Olah Raga dari Kab.Solok Selatan mampu bersaing ditingkat Propinsi dan Nasional 18. Adanya UKS yang berprestasi ke tingkat Propinsi Sumatera Barat 19. Adanya sekolah yang peduli lingkungan hidup (Adwiyata) 20.Terbentuknya Tim OSN yang berprestasi dan Mampu berkompetisi ditingkat Propinsi dan Nasional 21.Tersedianya siswa yang kreatif,berbakat dan berprestasi serta mampu bersaing di tingkat Propinsi dan Nasional 22.Terlaksananya kegiatan belajar bagi kelas 3 untuk menambah pengetahuan siswa dan menguatkan mental siswa dalam mengikuti UN

			23. Terlaksananya UN Paket A,B dan C serta target kelulusan pendidikan kesetaraan 24. Terlaksananya penyelenggaraan operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) 25. Tersedianya atlit siswa SLB yang mampu mewakili Kabupaten Solok Selatan ke tingkat Propinsi dan Nasional 26. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembekalan Sertifikasi Guru 27. Tersedianya Kepala Sekolah yang berkompeten 28. Tersedianya Tenaga yang mampu menilai Angka Kredit Fungsional Guru 29. Terpilihnya Guru dan Kepala Sekolah yang berkualitas dan berprestasi

			30. Terlaksananya Monitoring dan Pengelolaan Guru yang Profesional 31. Tersedianya Pengentrian,Padati/Web serta diperoleh NUPTK tenaga pendidik 32. Tersedianya tenaga perpustakaan Sekolah yang Profesional di semua tingkat pendidikan 33. Tersalurkannya Beasiswa kepada siswa miskin 34. Meningkatnya pengetahuan guru Bidang Studi IPA tentang penggunaan alat peraga IPA 35. Meningkatnya pengetahuan guru tentang pelaksanaan Pendidikan Berkarakter

			36. Meningkatnya pengetahuan guru tingkat SD tentang penyusunan kurikulum 37. Terciptanya atlit sepak bola dan tim terbaik Kabupaten Solok Selatan 38. Terlaksananya pembinaan bakat dan potensi pelajar SMP/SMA serta teridentifikasinya pelajar yang berprestasi.
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Kematian Bayi (AKB) 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) 3. Rasio Puskesmas terhadap Penduduk 4. Jumlah Posyandu yang aktif 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 6. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

			7. Angka Imunisasi Bayi,Anak Sekolah dan Ibu Hamil 8. Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 9. Cakupan ketersediaan obat 10. Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Batra 11. Cakupan pemantauan sarana produksi IRT dan Pangan yang beredar 12. Persentase Posyandu yang mandiri 13. Persentase hasil survey rumah tangga yang melaksanakan PHBS 14. Persentase Desa Siaga 15. Persentase cakupan Saka Bhakti Husada

			16. Persentase pelayanan kesehatan bagi remaja 17. Persentase Gizi Kurang ((BB/BT) 18. Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI ekslusif 19. Persentase anak balita dapat kapsul Vit A dua kali (2X) 20. Menurun prevalensi anak balita yang pendek (Stunting TB/U) 21. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan 22. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 23. Persentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat 24. Cakupan penanggulangan wabah

			25. Angka kesakitan penderita DBD 26. Angka kesakitan penderita Malaria 27. Penderita Malaria yang diobati 28. Meningkatnya cakupan Desa United Child Imunization (UCI) 29. Prevalensi Tubercolosa 30. Meningkatnya angka keberhasilan pengobatan TB (Succes Rate) 31. Prevalensi penanggulangan wabah 32. Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diluar tanggungan ASKES,JAMKESMAS dan Asuransi 33. Cakupan pelayanan kesehatan Prausila dan Usila

			34. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes yang terlatih 35. Cakupan penanganan Neo Natal komplikasi 36. Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi 37. Persentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil 38. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC) 39. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Ante Natal (cakupan A4) 40. Persentase ibu hamil,bersalin dan nifas yang mendapatkan penanganan komplilkas kebidanan (Cakupan PK)

			41. Persentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk 42. Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan 43. Menurunnya angka penularan penyakit HIV dari ibu ke janin 44. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 45. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 46. Persentase Neo natal resiko tinggi yang ditangani 47. Cakupan BBLR yang ditangani 48. Cakupan pelayanan anak balita 49. Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

			50. Cakupan penanggulangan masalah kesehatan 51. Cakupan pelayanan kesehatan daerah terpencil 52. Capain program kinerja di Puskesmas 53. Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang diakses masyarakat 54. Cakupan pelayanan farmasi dan alat kesehatan 55. Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melakukan pelayanan dasar 56. Persentase pengeluaran izin praktek bagi tenaga kesehatan 57. Cakupan pelayanan kesehatan melalui ADKES dan JAMKESDA

			58. Cakupan pelayanan kesehatan dengan manajemen BOK 59. Meningkatnya kualitas pelayanan dan Kunjungan (visite rate) 60. Cakupan pelayanan kesehatan Prausila dan Usila 61. Persentase ibu bersalin yang ditolong nakes yang terlatih 62. Cakupan penanganan neo natal komplikasi 63. Persentasecakupan penanganan kesehatan bayi 64. Persentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil 65. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ante natal care (ANC)

			66. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ante natal (cakupan K4) 67. Persentase ibu hamil,bersalin dan nifas yang mendapatkan penanganan komplilkasi kebidanan (Cakupan PK) 68. Persentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk 69. Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan 70. Menurunnya angka penularan penyakit HIV dari ibu ke janin 71. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 72. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)

			73. Persentase Neo natal resiko tinggi yang ditangani 74. Cakupan BBLR yang ditangani 75. Cakupan pelayanan anak balita 76. Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 77. Cakupan penanggulangan masalah kesehatan 78. Cakupan pelayanan kesehatan daerah terpencil 79. Capaian program kinerja di Puskesmas 80. Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang diakses masyarakat 81. Cakupan pelayanan farmasi dan alat kesehatan

			82. Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melakukan pelayanan dasar 83. Persentase pengeluaran izin praktek bagi tenaga Kesehatan 84. Cakupan pelayanan kesehatan melalui ADKES dan JAMKESDA 85. Cakupan pelayanan kesehatan dengan manajemen BOK 86. Meningkatnya kualitas pelayanan dan Kunjungan (visite rate) 87. Cakupan Peserta KB Aktif
3.	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran	Pengembangan usaha pertanian dan perkebunan berbasis agribisnis	1. Pembinaan pelaksanaan bantuan langsung bibit unggul 2. Pengembangan kawasan serta peningkatan produksi produktifitas dan mutu holtikultura

			3. Penilaian kelompok tani 4. Pemanfaatan pekarangan secara optimal 5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 6. Pemberdayaan petani dan ketahanan pangan 7. Pengembangan agribisnis di tingkat petani 8. Pelaksanaan dewan ketahanan pangan 9. Pengolahan dan promosi hasil produksi unggul daerah 10. Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT) Jeruk dan Pisang 11. Adanya kegiatan Sekolah Lapangan Program Pengembangan Hasil Pertanian (SL-P2HP) 12. Peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan keterampilan pemulia tanaman

			padi 13. Pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak 14. Pengembangan agribisnis Perternakan 15. Pengembangan Integrasi ternak dan tanaman 16. Penyuluhan dan pembinaan pengelolaan bibit ternak 17. Pengembangan ternak unggas dan pakan lokal di pedesaan 18. Inseminasi buatan 19. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam budidaya pemeliharaan ternak 20. Peningkatan produksi perikanan budidaya

			21. Peningkatan produksi ikan konsumsi 22. Hasil BBI Pakan Selasa Benih ikan 23. Peningkatan produksi benih di Unit Perikanan Rakyat (UPR) 24. Restocking benih 25. Pengembangan fasilitas pertemuan penyuluh dan petani 26. Penyebarluasan informasi pertanian 27. Pelaksanaan kinerja penyuluh pertanian tanaman pangan 28. Pelatihan petugas dan petani kebun 29. Pengembangan tanaman Kakao dan Karet 30. Penyaluran bantuan bibit perkebunan 31. Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

			32. Penyediaan bibit tanaman karet siap sebar
		Pengembangan usaha kecil menengah dan perdagangan	1. Fasiltasi permodalan dengan BUMN/BUMD 2. Pendataan,Pembinaan dan Penyuluhan IKM 3. Peningkatan pengawasan barang beredar 4. Pengawasan barang bersubsi dan strategis (Minyak tanah,Pupuk) 5. Penurunan biaya pemasaran dan Promosi 6. Optimalisasi dan Evaluasi PAD pasar
4.	Menumbuhkembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Perumusan,pengembangan serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya dengan spirit Sarantau Sasurambi	1. Pemeliharaan Cagar budaya 2. Pelestarian seni tradisional 3. Penyediaan buku sejarah berdirinya Kab.Solok Selatan 4. Pemberdayaan Seni tradisional dan Kebudayaan daerah

			5. Festival Sarantau Sasurambi 6. Pelaksanaan Event Olah raga untuk Masyarakat 7. Promosi kesenian daerah
5.	Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	1. Penyediaan data PMKS dan PSKS 2. Pembinaan lanjutan (Binjut) terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 3. Penyaluran Raskin 4. Penyaluran dana Bantuan Usaha Ekonomi produktif (UEP) 5. Fasilitasi pelaksanaan PNPM-MP 6. Penyediaan SPMN (Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari) 7. Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat 8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi

			tepat Guna 9. Pelaksanaan PNPM-LMP 10. Pembinaan Permodalan Usaha Ekonomi produktif pola Revolving 11. Pembinaan dan Monev Kredit Mikro nagari (KJKS) 12. Perlombaan Nagari Rancak/Nagari Berprestasi 13. Akses pelayanan terhadap penyandang PMKS 14. Peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat 15. Penyediaan bursa atau pasar kerja bagi para pencari kerja
6.	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya alam secara	Optimalisasi pengelolaan pertambangan,energi,kehutanan	1. Pengawasan dan Evaluasi pertambangan 2. Penurunan jumlah PETI di Kab.Solok

	profesional yang berwawasan lingkungan	dan potensi pariwisata	Selatan 3. Pengembangan jaringan listrik se-Kab.Solok Selatan 4. Pembangunan jaringan listrik Tenaga Picohydro 5. Pemetaaan Geologi 6. Peta potensi mineral non logam dan batuan regional 7. Data Hasil hutan bukan kayu 8. Survey potensi kawasan Kandis 9. Pembuatan areal Model usaha HR/Agroforestry 10. Penyusuanan rancangan teknik model hutan rakyat 11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

			12. Monitoring IUPHHK-HA, IUPHHK-HT,Kayu rakyat, dan HHBK 13. Monitoring hutan Hak 14. Pembinaan Tata usaha kayu dan pengurusan dokumen hasil hutan 15. Pengawasan produksi sarang burung walet 16. Teridentifikasinya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan kehutanan/Non kehutanan 17. Optimalisasi Penerimaan hibah daerah 18. Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 19. Pembinaan PPHBN 20. Penyelesaian kasus-kasus/adanya tindaklanjut hasil pengamanan hutan

			21. Penyebarluasan informasi parawisata 22. Terlaksananya program Sapta Pesona 23. Pemeliharaan Objek wisata 24. Pengembangan Objek wisata Kayak 25. Pengembangan objek wisata unggulan daerah
		Pelestarian lingkungan hidup	1. Penyediaan Lokasi TPA/TPS 2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pola P3SLH 3. Monitoring kegiatan/usaha yang berpotensi merusak lingkungan 4. Data dan informasi Status lingkungan hidup daerah (SLHD) 5. Data dan informasi kualitas sungai dan pencemaran air

			6. Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup 7. Penyusunan dokumen lingkungan bidang usaha
7.	Meningkatkan supremasi hukum dan kesadaran politik masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dan peningkatan supremasi hukum	1. Penyusunan buku analisis jabatan Perangkat daerah 2. Evaluasi SOTK Kab.Solok Selatan 3. Pembuatan TAPKIN dan LAKIP SKPD dan LAKIP PEMDA 4. Diklat penjenjangan Struktural/Pengiriman peserta diklat PIM 5. Diklat pembekalan purna tugas 6. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNSD 7. Pemberian penghargaan pada PNS yang berprestasi (Satyalencana)

			8. Pengiriman PNS untuk tugas belajar dan ikatan dinas 9. Pelayanan SIAPK 10. Terbitnya SK Pensiun,Taspen ,Karis/karsu,dan Karpeg 11. Adanya kepastian bagi PNS yang berkasus 12. Tersedianya PNS yang profesional dan efektif 13. Laporan keuangan akhir tahun dan reviu laporan keuangan daerah 14. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala 15. Penanganan Kasus di lingkungan PEMDA 16. Laporan hasil inventarisasi dan tindak lanjut TPTGR

			17. Laporan hasil monitoring 18. Publikasi hasil pembangunan melalui IT 19. Informasi penyelenggaran pemerintah daerah 20. Pengadaan barang dan Jasa melalui LPSE 21. Monitoring kegiatan SKPD 22. Pembuatan dan penyusuanan buku standar satuan biaya 23. Promosi potensi dan peluang investasi daerah 24. Pengawasan dan perizinan jasa kontruksi 25. Penyusunan buku profil Nagari 26. MONEV Pelaksanaan Pemerintahan Nagari 27. Kompetensi Camat dan Wali nagari

			28. Fasilitasi Pelaksanaan Block Grand Nagari 29. Pembangunan tapal batas nagari 30. Penyusunan buku LKPJ dan LPPD kepala daerah 31. Penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan 32. Penertiban administrasi pertanahan 33. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,sekolah maupun perkantoran 34. Pembakuan nama wilayah administrasi Kab.Solok Selatan 35. Monitoring Block Grand Nagari 36. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

			37. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 38. Rapat-rapat paripurna 39. Kegiatan reses 40. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah 41. Survei lapangan perizinan oleh tim teknis 42. Promosi dan penyebarluasan informasi perizinan 43. Tercetaknya Leaflet perizinan 44. Terlaksananya pengoperasian SIAK terpadu 45. Penerapan KTP berbasis NIK nasional (e-KTP) 46. Sosialisasi PERDA dan Penyuluhan Hukum 47. Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum

			48. MONEV produk hukum nagari 49. Penyusunan dan inventarisasi produk hukum daerah 50. Penyelesaian perkara /memberikan bantuan hukum 51. Terselenggaranya dan terpenuhinya OPS GAKKUM,Perda dan Keputusan Kepala Daerah 52. Operasi penertiban pedagang kaki lima 53. Pelaksanaan operasi pemberantasan PEKAT 54. Pembinaan administrasi Pengurus partai politik 55. Terlaksananya kegiatan KOMINDA 56. Terciptanya kerukunan antar umat beragama 57. Penyuluhan dan Peningkatan wawasan

			kebangsaan 58. Penyuluhan dan Operasional TIM BNK 59. Penyediaan bahan bacaan perpustakaan umum daerah 60. Operasional perpustakaan keliling 61. Penigkatan kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran 62. Pencapaian PBB 63. Pencapaian PAD 64. Pencapaian BPHTB 65. Peningkatan kualitas laporan keuangan 66. Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang	1. Penyusunan buku PDRB Solok Selatan Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

	daerah	berkualitas berdasarkan kepada rencana tata ruang wilayah	2. Fasilitasi WISMP 3. Fasilitasi Dokumen Renstra SKPD,AMPL,dan Rencana Aksi Daerah 4. Publikasi Perda RPJPD dan RPJMD 5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 6. Monitoring,Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah 7. Penyusunan Revisi RPIJM th 2011-2017 8. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 9. Fasilitasi Tim Koordinasi Pencapaian pembangunan Daerah Tertinggal (TKPPDT) 10. Pemanfaatn,Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

			11. Penyusunan dan pembahasan Draft Ranperda RTRW Kabupaten Solok Selatan
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar	Pembangunan kawasan perkotaan,prasarana jalan,jembatan,dan irigasi	1. Pembangunan Jembatan kabupaten 2. Peningkatan jalan kabupaten 3. Pembangunan Saluran Drynase dan gorong-gorong 4. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 5. Rehabilitasi/pemeliharaan periodik jalan kabupaten 6. Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten 7. Pembangunan jaringan air bersih/Air Minum 8. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 9. Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi sungai

			10. Rehabilitasi/pemeliharaan Alur sungai (Sungai kecil) 11. Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran pembawa 12. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur 13. Pembangunan dan peningkatan pasar 14. Pembagunan jalan dan jembatan pedesaan 15. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas 16. Pengadaan dan pemasangan marka jalan 17. Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan 18. Pengadaan dan pemasangan Quardrall

			19. Pengadaan dan pemasangan kerucut lalu lintas/Traffic con 20. Pengadaan dan pemasangan Billboard 21. Pengadaan dan pemasangan Warning Light
		Kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1. Identifikasi daerah rawan bencana serta langkah evakuasi korban bencana 2. Pembuatan peta bencana 3. Pendidikan bencana 4. Pelaksanaan Gladi Posko bencana 5. Terlaksananya kegiatan mitigasi bencana 6. Pengendalian operasi penanggulangan bencana 7. Penanganan bencana secara cepat dan tepat 8. Rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana

			9. Fasilitasi penanggulangan kerusakan infrastruktur paska bencana

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA